

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD)

DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

KABUPATEN PESISIR SELATAN

TAHUN 2017

Form. 1.

SKPD Pelaksana: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan

Urusan yang dilaksanakan:

- 1. Urusan Sosial
- 2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- 3. Urusan Pariwisata

I. URUSAN SOSIAL

A. Jumlah Program sebanyak 9 program dan Kegiatan sebanyak 28 kegiatan.

Rincian Program dan kegiatan :

NO.	URUSAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	BELANJA LANGSUNG										TINGKAT CAPAIAN (%)
		ANGGARAN					REALISASI					
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG DAN JASA	BELANJA PEMELIHARAAN	BELANJA MODAL	TOTAL	BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG DAN JASA	BELANJA PEMELIHARAAN	BELANJA MODAL	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7=(3+4+5+6)	8	9	10	11	12=(8+9+10+11)	13
I.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	158.680.000	372.159.124	0	0	530.839.124	157.873.000	353.529.856	0	0	511.402.856	96,34
1.	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0	13.350.000	0	0	13.350.000	0	3.589.406	0	0	3.589.406	26,89
2.	Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	58.080.000	17.771.400	0	0	75.851.400	57.273.000	17.768.200	0	0	75.041.200	98,93
3.	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	91.000.000	10.580.200	0	0	101.580.200	91.000.000	10.436.700	0	0	101.436.700	99,86
4.	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	0	34.998.224	0	0	34.998.224	0	33.788.288	0	0	33.788.288	96,54
5.	Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	0	29.639.300	0	0	29.639.300	0	25.899.250	0	0	25.899.250	87,38
6.	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0	8.675.000	0	0	8.675.000	0	7.682.500	0	0	7.682.500	88,56
7.	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan	0	11.320.000	0	0	11.320.000	0	10.320.000	0	0	10.320.000	91,17
8.	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	0	17.925.000	0	0	17.925.000	0	17.050.000	0	0	17.050.000	95,12
9.	Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi keLuar Daerah	9.600.000	162.850.000	0	0	172.450.000	9.600.000	161.945.512	0	0	171.545.512	99,48

NO.	URUSAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	BELANJA LANGSUNG										TINGKAT CAPAIAN (%)
		ANGGARAN					REALISASI					
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG DAN JASA	BELANJA PEMELIHARAAN	BELANJA MODAL	TOTAL	BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG DAN JASA	BELANJA PEMELIHARAAN	BELANJA MODAL	TOTAL	
10.	Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	0	65.050.000	0	0	65.050.000	0	65.050.000	0	0	65.050.000	100
II.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	20.800.000	171.238.400	72.300.000	356.099.500	620.437.900	20.800.000	166.146.138	68.758.500	343.034.500	598.739.138	96,50
1.	Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	750.000	0	0	252.615.000	253.365.000	750.000	0	0	241.181.500	241.931.500	95,49
2.	Kegiatan Pengadaan Meubiler	250.000	0	0	75.984.500	76.234.500	250.000	0	0	74.610.000	74.860.000	98,20
3.	Kegiatan Pemeliharaan rutin/Berkala Gedung Kantor	0	0	62.500.000	27.500.000	90.000.000	0	0	60.908.500	27.243.000	88.151.500	97,95
4.	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	19.800.000	171.238.400	0	0	191.038.400	19.800.000	166.146.138	0	0	185.946.138	97,33
5.	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	0	0	9.800.000	0	9.800.000	0	0	7.850.000	0	7.850.000	80,10
III.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	0	45.000.000	0	0	45.000.000	0	44.866.354	0	0	44.866.354	99,70
1.	Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0	45.000.000	0	0	45.000.000	0	44.866.354	0	0	44.866.354	99,70
IV.	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	68.400.000	395.666.600	0	600.000	464.666.600	66.605.500	307.363.742	0	0	373.969.242	80,48
1.	Kegiatan Penunjang Operasional Program Keluarga Harapan (PKH)	9.600.000	83.219.460	0	0	92.819.460	9.600.000	75.217.418	0	0	84.817.418	91,38
2.	Kegiatan Pelayanan Orang Terlantar diperjalanan	3.600.000	113.475.980	0	0	117.075.980	3.000.000	65.413.830	0	0	68.413.830	58,44
3.	Kegiatan Pengembangan SLRT Kabupaten Pesisir Selatan	750.000	79.885.520	0	0	80.635.520	0	59.287.550	0	0	59.287.550	73,53
4.	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Data PBI APBD/APBN	0	40.027.400	0	0	40.027.400	0	38.329.900	0	0	38.329.900	95,76
5.	Kegiatan Pendampingan dan Pembinaan KUBE Fakir Miskin	1.200.000	24.568.440	0	0	25.768.440	1.200.000	19.988.440	0	0	21.188.440	82,23

NO.	URUSAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	BELANJA LANGSUNG										TINGKAT CAPAIAN (%)
		ANGGARAN					REALISASI					
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG DAN JASA	BELANJA PEMELIHARAAN	BELANJA MODAL	TOTAL	BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG DAN JASA	BELANJA PEMELIHARAAN	BELANJA MODAL	TOTAL	
6.	Kegiatan Pemutakhiran Data KKS (Kartu Kesejahteraan Sosial)	53.250.000	54.489.800	0	600.000	108.339.800	52.805.500	49.126.604	0	0	101.932.104	94,09
V.	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	7.200.000	86.166.900	0	0	93.366.900	7.200.000	83.158.150	0	0	90.358.150	96,78
1.	Kegiatan Penanganan Masalah Strategis tentang Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa	7.200.000	86.166.900	0	0	93.366.900	7.200.000	83.158.150	0	0	90.358.150	96,78
VI.	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	0	79.053.040	0	0	79.053.040	0	77.291.400	0	0	77.291.400	97,77
1.	Kegiatan Bimbingan Sosial dan Pendampingan Jaminan Sosial Penyandang Cacat Berat	0	79.053.040	0	0	79.053.040	0	77.291.400	0	0	77.291.400	97,77
VII.	Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo	5.550.000	466.431.430	0	0	471.981.430	5.550.000	397.372.680	0	0	402.922.680	85,37
1.	Kegiatan Penyediaan bahan Sembako Anak Dalam Panti	5.550.000	466.431.430	0	0	471.981.430	5.550.000	397.372.680	0	0	402.922.680	85,37
VIII.	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	10.800.000	226.890.880	0	2.500.000	240.190.880	10.800.000	212.866.680	0	2.500.000	226.166.680	94,16
1.	Kegiatan Penguatan Kelembagaan Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) Kabupaten	10.800.000	226.890.880	0	2.500.000	240.190.880	10.800.000	212.866.680	0	2.500.000	226.166.680	94,16
IX.	Program Penanaman Nilai-Nilai Kepahlawanan dan Keperintisan	0	228.838.470	0	0	228.838.470	0	196.344.200	0	0	196.344.200	85,80
1.	Kegiatan Sarasehan Penanaman Nilai-Nilai Kepahlawanan Bagi Generasi Muda	0	109.216.320	0	0	109.216.320	0	81.351.200	0	0	81.351.200	74,49
2.	Kegiatan Peningkatan Sarana Prasarana Kepahlawanandan Keperintisan	0	119.622.150	0	0	119.622.150	0	114.993.000	0	0	114.993.000	96,13
	TOTAL	271.430.000	2.071.444.844	72.300.000	359.199.500	2.774.374.344	268.828.500	1.838.939.200	68.758.500	345.534.500	2.522.060.700	90,91

B. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan Solusi:

- Semua Program dan Kegiatan dapat berjalan dengan baik, namun untuk Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listriknya 26,89 % , hal ini disebabkan karena dianggarkan pada perubahan anggaran dan sebelumnya listrik masih digabung dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- Sedangkan Kegiatan Pelayanan Orang Terlantar diperjalanan 58,44 % semuakusus yang ada dapat diselesaikan dengan baik,

II. URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

A. Jumlah Program sebanyak 3 program dan Kegiatan sebanyak 8 kegiatan.

Rincian Program dan kegiatan :

NO.	URUSAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	BELANJA LANGSUNG										TINGKAT CAPAIAN (%)
		ANGGARAN					REALISASI					
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG DAN JASA	BELANJA PEMELIHARAAN	BELANJA MODAL	TOTAL	BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG DAN JASA	BELANJA PEMELIHARAAN	BELANJA MODAL	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7=(3+4+5+6)	8	9	10	11	12=(8+9+10+11)	13
I	Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan/Nagari	9.750.000	433.549.700	0	0	443.299.700	9.750.000	358.540.022	0	0	368.290.022	83,08
1.	Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan GOW Kabupaten	0	279.393.760	0	0	279.393.760	0	234.689.514	0	0	234.689.514	84,00
2.	Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Dharmawanita Persatuan Kabupaten	9.750.000	103.709.120	0	0	113.459.120	9.750.000	90.232.208	0	0	99.982.208	88,12
3.	Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan BKMT Kabupaten	0	50.446.820	0	0	50.446.820	0	33.618.300	0	0	33.618.300	66,64
II.	Program Perlindungan Anak	18.600.000	214.101.200	0	0	232.701.200	17.600.000	192.707.060	0	0	209.870.120	90,19
1.	Kegiatan Pembinaan Nagari Sayang Anak	18.600.000	132.066.640	0	0	150.666.640	17.600.000	131.707.060	0	0	149.307.060	99,10
2.	Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0	82.034.560	0	0	82.034.560	0	60.563.060	0	0	60.563.060	73,83
III.	Program Penguatandan Pembangunan Kelembagaan Beserta Jaringan dan Penyusunan Regulasi Daerah	16.950.000	247.374.720	0	0	264.324.720	16.200.000	222.846.625	0	0	239.046.625	90,44
1.	Kegiatan Pembinaan Kelembagaan PUG dan Perlindungan Anak	3.600.000	88.656.190	0	0	92.256.190	3.600.000	85.689.340	0	0	89.289.340	96,78
2.	Kegiatan Penyusunan Anggaran Responsif Gender	3.600.000	68.468.790	0	0	72.068.790	3.600.000	63.505.765	0	0	67.105.765	93,11

NO.	URUSAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	BELANJA LANGSUNG										TINGKAT CAPAIAN (%)
		ANGGARAN					REALISASI					
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG DAN JASA	BELANJA PEMELIHARAAN	BELANJA MODAL	TOTAL	BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG DAN JASA	BELANJA PEMELIHARAAN	BELANJA MODAL	TOTAL	
3.	Kegiatan Penyusunan Ranperda dan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak	9.750.000	90.249.740	0	0	99.999.740	9.000.000	73.651.520	0	0	82.651.520	82,91
	TOTAL	45.300.000	895.025.620	0	0	940.325.620	43.550.000	773.656.767	0	0	817.206.767	86,91

B. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan Solusi:

- Semua Program dan Kegiatan dapat berjalan dengan baik.

III. **URUSANPARIWISATA**

A. Jumlah Program sebanyak 1 program danKegiatansebanyak1 kegiatan.

Rincian Program dankegiatan :

NO.	URUSAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	BELANJA LANGSUNG										TINGKAT CAPAIAN (%)
		ANGGARAN					REALISASI					
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG DAN JASA	BELANJA PEMELIHARAAN	BELANJA MODAL	TOTAL	BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG DAN JASA	BELANJA PEMELIHARAAN	BELANJA MODAL	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7={3+4+5+6}	8	9	10	11	12={8+9+10+11}	13
I.	Program PengembanganPemasaranPari wisata	0	14.997.800	0	0	14.997.800	0	14.717.800	0	0	14.717.800	98,13
1.	Pelaksanaan Festival Langkisau	0	14.997.800	0	0	14.997.800	0	14.717.800	0	0	14.717.800	98,13
	TOTAL	0	14.997.800	0	0	14.997.800	0	14.717.800	0	0	14.717.800	98,13

Form: 2.
SDM Pendukung Program dan Kegiatan:

DATA PEGAWAI NEGERI SIPIL

DILINGKUNGAN DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PESISIR SELATAN

PER 29 DESEMBER 2017

I. URUSAN SOSIAL:

No.	Nama/NIP	Jabatan		Kualifikasi Pendidikan terakhir					Jenis Kelamin		Golongan				Pendidikan Pelatihan Struktural (Diklat PIM)			
		Nama Jabatan	Struktural/ Fungsional	SD/ SLTP	SLTA	DIII	S1	S2	LK	PR	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1.	Dra. RIO FATMA ERNI, MM NIP. 19610424 198210 2 003	Kepala Dinas	S	-	-	-	-	v	-	v	-	-	-	v	-	-	v	v
2.	SYAMSIWAL, SH, MM NIP. 19600922 198503 1 004	Sekretaris	S	-	-	-	-	v	v	-	-	-	-	v	-	-	-	v
3.	LETTI SILVIA H, SST, SS, M.Si NIP. 19810907 200501 2 005	Kasubbag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	S	-	-	-	-	v	-	v	-	-	v	-	-	-	-	-
4.	EVA SUSANTI, SIP NIP. 19721116 200501 2 002	Kabid Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin	S	-	-	-	v	-	-	v	-	-	v	-	-	-	-	v
5.	AHMAD HIDAYAT, SSTP, M.Sc NIP. 19830608 200012 1 002	Kabid Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial	S	-	-	-	-	v	v	-	-	-	v	-	-	-	-	v
6.	EKA MAIZALNI, AM, AK NIP. 19760511 199603 2 001	Kasi Pemberdayaan Sosial	S	-	-	v	-	-	-	v	-	-	v	-	-	-	-	-
7.	DEKI RAVINO, S.Pt NIP. 19841215 200902 1 005	Kasi Rehabilitasi Sosial	S	-	-	-	v	-	v	-	-	-	v	-	-	-	-	-
8.	NOVRINI YANTI, S.Pd NIP. 19721121 199803 2 002	Kasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dan Penanaman Nilai-Nilai Kepahlawanan	S	-	-	-	v	-	-	v	-	-	v	-	-	-	-	v

No.	Nama/NIP	Jabatan		Kualifikasi Pendidikan terakhir					Jenis Kelamin		Golongan				Pendidikan Pelatihan Struktural (Diklat PIM)			
		Nama Jabatan	Struktural/Fungsional	SD/SLTP	SLTA	DIII	S1	S2	LK	PR	I	II	III	IV	I	II	III	IV
9.	WINDRIAL, SH NIP. 19610817 198602 1 004	Kasi Perlindungan Sosial, Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial	S	-	-	-	v	-	v	-	-	-	v	-	-	-	-	v
10.	AFRIZAL A, SH NIP. 19600112 198303 1 006	Kasi Bantuan dan Jaminan Sosial	S	-	-	-	v	-	v	-	-	-	v	-	-	-	-	v
11.	Dra. NURDAYELNI NIP. 19650524 199203 2 003	Kasi Penanganan Fakir Miskin	S	-	-	-	v	-	-	v	-	-	-	v	-	-	-	-
12.	Drs. Erizal NIP. 19631110 199005 1 001	Staf	S	-	-	-	v	-	v	-	-	-	-	v	-	-	-	-
13.	BETRIYENI, S.P NIP. 19691209 199003 2 001	Staf	S	-	-	-	v	-	-	v	-	-	v	-	-	-	-	-
14.	HARI SUBAGYA NIP. 19641209 198910 1 001	Staf	S	-	v	-	-	-	v	-	-	-	v	-	-	-	-	-
15.	RINI HERIYANTI, SE NIP. 19730627 200604 2 008	Staf	S	-	-	-	v	-	-	v	-	-	v	-	-	-	-	-
16.	SYAFRIJEF, S.TP NIP. 19820621 201407 1 002	Staf	S	-	-	-	v	-	v	-	-	-	v	-	-	-	-	-
17.	RAMLIS NIP. 19641212 200604 1 005	Staf	S	-	v	-	-	-	v	-	-	v	-	-	-	-	-	-
18.	IRMA YENNI NIP. 19770715 200701 2 006	Staf	S	-	v	-	-	-	-	v	-	v	-	-	-	-	-	-
19.	RAYMON SAPUTRA NIP. 19781006 200701 1 004	Staf	S	-	v	-	-	-	v	-	-	v	-	-	-	-	-	-
	Total			-	4	1	10	4	10	9	-	3	12	4	-	-	1	7

II. URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK:

No.	Nama/NIP	Jabatan		Kualifikasi Pendidikan terakhir					Jenis Kelamin		Golongan				Pendidikan Pelatihan Struktural (Diklat PIM)			
		Nama Jabatan	Struktural/ Fungsional	SD/ SLTP	SLTA	DIII	S1	S2	LK	PR	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1.	LOLI NOFITA, SSTP, M.Si NIP. 19820627 200012 2 001	Kabid Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	S	-	-	-	-	v	-	v	-	-	v	-	-	-	-	v
2.	DESRI LAKSMIDARTI, S.Pt NIP. 19731224 200801 2 006	Kasi Peningkatan Kualitas Hidup dan Pemberdayaan Perempuan	S	-	-	-	v	-	-	v	-	-	v	-	-	-	-	-
3.	MARFEN ROSADI, ST NIP. 19720307 200801 1 010	Kasi Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak	S	-	-	-	v	-	v	-	-	-	v	-	-	-	-	-
4.	AKMAL EFFENDI NIP. 19591222 198503 1 009	Kasi Data dan Informasi	S	-	v	-	-	-	v	-	-	-	v	-	-	-	-	v
5.	ASWITA, S.ST NIP. 19760912 200604 2 006	Staf	S	-	-	-	v	-	-	v	-	-	v	-	-	-	-	-
Total				-	1	-	3	1	2	3	-	-	5	-	-	-	-	2

III. URUSAN PARIWISATA:

No.	Nama/NIP	Jabatan		Kualifikasi Pendidikan terakhir					Jenis Kelamin		Golongan				Pendidikan Pelatihan Struktural (Diklat PIM)			
		Nama Jabatan	Struktural/ Fungsional	SD/ SLTP	SLTA	DIII	S1	S2	LK	PR	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1.	HARTETI, SH NIP. 19730302 200701 2 012	Kasub bag. Umum dan Kepegawaian	S	-	-	-	v	-	-	v	-	-	v	-	-	-	-	v
2.	HILDA RULFIZA NIP. 19671218 199212 2 001	Staf	S	-	v	-	-	-	-	v	-	-	v	-	-	-	-	-
Total				-	1	-	1	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	1

Painan, 15 Januari 2018
KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PESISIR SELATAN

dto

Dra. RIO FATMA ERNI, MM
NIP. 19610424 198210 2 003

LAMPIRAN III.1
TATARAN PENGAMBIL KEBIJAKAN
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2017

DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

	ASPEK	FOKUS	No.	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2017)	Capaian Kinerja	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	KESELARASAN DAN EFEKTIVITAS HUBUNGAN ANTARA PEMERINTAHAN DAERAH DAN PEMERINTAH SERTA ANTAR PEMERINTAHAN DAERAH DALAM RANGKA PENGEMBANGAN OTONOMI DAERAH	Hubungan antar daerah	13	Kerjasama dengan daerah lain atau pihak lain	Jumlah MOU yang masih berlaku per tahun 2017	Jumlah MOU yang masih berlaku pada tahun 2017, sebanyak 0 MOU yang terdiri dari: 1) MOU dengan ----- tentang kerjasama -----. 2) MOU dengan ----- tentang kerjasama ----- 3) Dst---	0 MOU	Tidak ada MOU dengan daerah lain
13	TEROBOSAN / INOVASI BARU DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Penghargaan	42	Penghargaan dari pemerintah yang diterima oleh Pemda dalam tahun 2017.	Jumlah penghargaan dari pemerintah yang diterima oleh Pemerintah Daerah dalam Tahun 2017	Penghargaan yang diterima, sebanyak 1 yang terdiri dari 1) Penghargaan dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kepada Bupati Pesisir Selatan sebagai Inisiator Kab. Pesisir Selatan Menuju Kabupaten Layak Anak, Solok, 19 April 2017	1	Ada

Painan, 15 Januari 2018

KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

DAN PERLINDUNGAN ANAK

KABUPATEN PESISIR SELATAN

dto

Dra. RIO FATMA ERNI, MM

NIP. 19610424 198210 2 003

LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK

KABUPATEN

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM

DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2017

KABUPATEN : PESISIR SELATAN

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

URUSAN YANG DILAKSANAKAN:

Diisi oleh Perangkat Daerah, yang melaksanakan 3 (tiga) urusan

1. Urusan Sosial
2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA)
3. Urusan Pariwisata

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data			Capaian Kinerja			KET
						Urusan Sosial	Urusan PPPA	Urusan Pariwisata	Urusan Sosial	Urusan PPPA	Urusan Pariwisata	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)		(7B)	(8A)		(8B)	(9)
	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional (yang melekat di kementrian/LPNK) yang harus dilaksanakan oleh Perangkat Daerah	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dibagi jumlah program Nasional x 100%	Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 5 program. Jumlah program nasional yang dilaksanakan Perangkat Daerah, sebanyak 3 program	Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 3 program. Jumlah program nasional yang dilaksanakan Perangkat Daerah, sebanyak 3 program	Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 3 program. Jumlah program nasional yang dilaksanakan Perangkat Daerah, sebanyak 1 program	60 %	100 %	33 %	Program Nasional RKP 2010 untuk masing-masing urusan
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Departemen / LPND	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Apabila Ada, sebutkan ada sebanyak 7 (tujuh) SOP yang terdiri dari: 1. SOP ttg Peningkatan Penguatan Kelembagaan LKKS Perempuan 2. SOP ttg Pelaksanaan Ziarah Perorangan, Ziarah Rombongan/Kelompok	Apabila Ada, sebutkan ada sebanyak 7 (tujuh) SOP yang terdiri dari: 1. SOP ttg Penyusunan Anggaran Responsive Gender 2. SOP ttg Pelayanan P2TP2A 3. SOP ttg Pelaksanaan Kegiatan Hari Ibu	Apabila Ada, sebutkan ada sebanyak 0 (nol) SOP yang terdiri dari: 1. SOP ttg.....	Ada 7 SOP	Ada 7 SOP	Tidak Ada	Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor: 460/306/SK/DSPPr PA-PS/V/2017 tentang SOP pada Dinas Sosial,

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data			Capaian Kinerja			KET
						Urusan Sosial	Urusan PPPA	Urusan Pariwisata	Urusan Sosial	Urusan PPPA	Urusan Pariwisata	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)		(7B)	(8A)		(8B)	(9)
						3. SOP ttg Penemuan Bayi/Anak Tanpa Identitas Keluarga/Orang 4. SOP ttg Rekomendasi SIOP Panti dan Orsos 5. SOP ttg Pengurusan Rekomendasi untuk BPJS 6. SOP ttg Perlindungan Sosial 7. SOP ttg Program Keluarga Harapan (PKH)	4. SOP ttg Rapat Peringatan Hari Ibu 5. SOP ttg Pelatihan dan Pemberdayaan Organisasi Perempuan 6. SOP ttg Pembuatan Keputusan Bupati tentang Pokja 7. SOP ttg Pembuatan Regulasi Daerah terhadap Perlindungan Perempuan dan Anak					Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan 2017
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan Perangkat Daerah menurut Peraturan Menteri (PERMEN tentang SPM	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM x 100%	- PERDA pelaksanaan sebanyak 1. - PERDA yang seharusnya, sebanyak 1 SPM	- PERDA pelaksanaan sebanyak 1 - PERDA yang seharusnya, sebanyak 1	- PERDA pelaksanaan sebanyak 1 - PERDA yang seharusnya, sebanyak 1	100 %	100 %	100 %	Normalisasi
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang terisi dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang terisi sebanyak 11 - Jabatan yang ada, sebanyak 11	- Jabatan yang terisi sebanyak 4 - Jabatan yang ada, sebanyak 4	- Jabatan yang terisi sebanyak 1 - Jabatan yang ada, sebanyak 1	100 %	100 %	100 %	Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional, -----.	Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional, -----.	Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional, -----.	tidak ada	tidak ada	tidak ada	

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data			Capaian Kinerja			KET
						Urusan Sosial	Urusan PPPA	Urusan Pariwisata	Urusan Sosial	Urusan PPPA	Urusan Pariwisata	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)		(7B)	(8A)		(8B)	(9)
4	PENGLOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS kabupaten	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Kabupaten	PNS yang menangani urusan (1) Perangkat Daerah , sebanyak 19 personil Total PNS Kabupaten, sebanyak 7.171 personil	PNS yang menangani urusan (2) Perangkat Daerah , sebanyak 5 personil Total PNS Kabupaten, sebanyak 7.171 personil	PNS yang menangani urusan (3) Perangkat Daerah , sebanyak 2 personil Total PNS Kabupaten, sebanyak 7.171 personil	0,26 %	0,07 %	0,03 %	
			7	Rasio pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 3 org. Pejabat yang ada, sebanyak 11 org.	Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 1 org. Pejabat yang ada, sebanyak 4 org.	Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 1 org. Pejabat yang ada, sebanyak 1 org.	0,27 %	0,25 %	100 %	
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 11 org. Jabatan yang ada, sebanyak 11 jbt.	Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 4 org. Jabatan yang ada, sebanyak 4 jbt.	Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 1 org. Jabatan yang ada, sebanyak 1 jbt.	100 %	100 %	100 %	
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di Perangkat Daerah - RENSTRA Perangkat Daerah - RENJA Perangkat Daerah - RKA Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan Perangkat Daerah berikut jumlahnya	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2017, sebanyak 4 jenis, yg terdiri dari: 1. Renstra 2. Renja 3. RKA 4. DPA	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2017, sebanyak 4 jenis, yg terdiri dari: 1. Renstra 2. Renja 3. RKA	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2017, sebanyak 4 jenis, yg terdiri dari: 1. Renstra 2. Renja 3. RKA	4 jenis dokumen	4 jenis dokumen	4 jenis dokumen	Tidak ada Pemisahan Dokumen

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data			Capaian Kinerja			KET
						Ururan Sosial	Ururan PPPA	Ururan Pariwisata	Ururan Sosial	Ururan PPPA	Ururan Pariwisata	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)		(7B)	(8A)		(8B)	(9)
							4. DPA	4. DPA				
		Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah, sebanyak 9 program. - Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 9	- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah, sebanyak 3 program. - Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 3	- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah, sebanyak 1 program. - Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 1	100 %	100 %	100 %	Mengacu dokumen RKPD tahun 2017 dan Renja-Perangkat Daerah ybs.
		Sinkronisasi program RKA Perangkat Daerah dengan Program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 9 program. - Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 9 program.	- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 3 program. - Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 3 program.	- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 1 program. - Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 1 program.	100 %	100 %	100 %	Mengacu dokumen RKA-Perangkat Daerah tahun 2017 dan Renja-Perangkat Daerah ybs.
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerah x 100%	- Program RENJA Perangkat daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 9 program. - Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 9 program.	- Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 3 program. - Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 3 program.	- Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 1 program. - Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 1 program.	100 %	100 %	100 %	Mengacu dokumen RKA-Perangkat Daerah tahun 2017 dan dokumen DPA-Perangkat Daerah ybs tahun 2017.

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data			Capaian Kinerja			KET
						Ururan Sosial	Ururan PPPA	Ururan Pariwisata	Ururan Sosial	Ururan PPPA	Ururan Pariwisata	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)		(7B)	(8A)		(8B)	(9)
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Realisasi anggaran	13	Realisasi belanja Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Realisasi belanja Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	- Total realisasi belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. 5.293.161.902,- - Total Belanja APBD, sebesar -- ---	- Total realisasi belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. 817.206.767,- - Total Belanja APBD, sebesar -----	- Total realisasi belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. 14.717.800,- - Total Belanja APBD, sebesar -----	 %	 %	 %	Mengacu Laporan Keuangan Daerah tahun 2017.
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja Perangkat Daerah (realisasi)	Belanja modal dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Belanja Modal Perangkat Daerah, sebesar Rp. 345.534.500,- - Total Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. 5.293.161.902,-	- Belanja Modal Perangkat Daerah, sebesar Rp. 0,- - Total Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. 817.206.767,-	- Belanja Modal Perangkat Daerah, sebesar Rp. 0,- - Total Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. 14.717.800,-	6,53 %	0 %	0 %	Mengacu LKD tahun 2017.
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa (realisasi)	total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa Perangkat Daerah) x 100%	- Total belanja pemeliharaan Perangkat Daerah, sebesar Rp. 68.758.500,- - Total belanja barang dan jasa Perangkat Daerah, sebesar Rp. 1.838.939.200,-	- Total belanja pemeliharaan Perangkat Daerah, sebesar Rp. 0,- - Total belanja barang dan jasa Perangkat Daerah, sebesar Rp. 773.656.767,-	- Total belanja pemeliharaan Perangkat Daerah, sebesar Rp. 0,- - Total belanja barang dan jasa Perangkat Daerah, sebesar Rp. 14.717.800,-	3,74 %	0 %	0 %	Mengacu LKD tahun 2017.
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja Perangkat Daerah (realisasi)	total belanja pemeliharaan dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	- total belanja pemeliharaan Perangkat Daerah, sebesar Rp. 68.758.500,- - Total belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. 5.293.161.902,-	- total belanja pemeliharaan Perangkat Daerah, sebesar Rp. 0,- - Total belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. 817.206.767,-	- total belanja pemeliharaan Perangkat Daerah, sebesar Rp. 0,- - Total belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. 14.717.800,-	1,30 %	0 %	0 %	Mengacu APBD tahun 2017.
		Laporan keuangan Perangkat Daerah	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)	Apabila Ada, Lapaoran keuangan ada, sebanyak 7 jenis, sbb: 1. Neraca 2. Calk	Apabila Ada, Lapaoran keuangan ada, sebanyak 7 jenis, sbb: 1. Neraca	Apabila Ada, Lapaoran keuangan ada, sebanyak 7 jenis, sbb: 1. Neraca	Ada sebanyak 7 jenis	Ada sebanyak 7 jenis	Ada sebanyak 7 jenis	Tidak ada pemisahan Laporan Keuangan

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data			Capaian Kinerja			KET
						Ururan Sosial	Ururan PPPA	Ururan Pariwisata	Ururan Sosial	Ururan PPPA	Ururan Pariwisata	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)		(7B)	(8A)		(8B)	(9)
						3. LRA 4. Laporan Operasional 5. Laporan Perubahan Ekuitas 6. Laporan Fungsional 7. Laporan Bulanan Perkembangan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pembangunan	2. Calk 3. LRA 4. Laporan Operasional 5. Laporan Perubahan Ekuitas 6. Laporan Fungsional 7. Laporan Bulanan Perkembangan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pembangunan	2. Calk 3. LRA 4. Laporan Operasional 5. Laporan Perubahan Ekuitas 6. Laporan Fungsional 7. Laporan Bulanan Perkembangan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pembangunan				
7	PENGLOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset Perangkat daerah	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset Perangkat daerah	Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya. Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (SIPKD) yaitu Laporan Barang Milik Daerah yang terdiri dari: - Rekapitulasi Daftar Mutasi - KIR - KIB A, B, C, D - dll	Tidak Ada Pemisahan Laporan Aset	Tidak Ada Pemisahan Laporan Aset	Ada	Ada	Ada	
		Penggunaan Asset Perangkat Daerah	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %	- Asset yang tidak digunakan, sebanyak 0,- asset. - Asset yang dikuasai Perangkat Daerah, sebanyak 914.250.862,- asset.	Tidak Ada Pemisahan Asset OPD	Tidak Ada Pemisahan Asset OPD	0 %	0 %	0 %	

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data			Capaian Kinerja			KET
						Urusan Sosial	Urusan PPPA	Urusan Pariwisata	Urusan Sosial	Urusan PPPA	Urusan Pariwisata	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)		(7B)	(8A)		(8B)	(9)
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Sebutkan jenisnya 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan (Sekretariat SLRT) 3. WA SLRT 4. Email SLRT: slrtpesisirselatan@gmail.com 5. WA TKSK 6. TKSK masing Kecamatan 7. Fasilitator masing Nagari 8. Mobil Dapur Umum 9. Pengumuman di Media Massa	Sebutkan jenisnya 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan (P2TP2A Mande rubiah) 3. WA P2TP2A 4. Email P2TP2A: p2tp2_pessel@yahoo.com 5. Mobil Perlindungan Anak 6. Pengumuman di Media Massa	Sebutkan jenisnya 1. Stand Festival Langkisau	Jumlah sebanyak 9 jenis.	Jumlah sebanyak 6 jenis.	Jumlah sebanyak 1 jenis.	Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada, tidak terbatas pada daftar yang ada.
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang ----	Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang ----	Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang - ----	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Perangkat daerah

LAMPIRAN III.3

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN

ASPEK TINGKAT CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN WAJIB DAN URUSAN PILIHAN

DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2017

DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KETETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
URUSAN WAJIB						
12	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	43	Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	$\frac{\text{Pekerja perempuan di lembaga pemerintah}}{\text{Jumlah pekerja perempuan}} \times 100 \%$	$\frac{4.664}{6.084} = 76,66\%$	
		44	Angka melek huruf perempuan usia 15th keatas	$\frac{\text{Jumlah anak perempuan usia > 15 yg melek huruf}}{\text{Jumlah_anak perempuan usia > 15 tahun}} \times 100 \%$	$\frac{152.203}{247.449} = 61,51\%$	
		45	Partisipasi angkatan kerja perempuan	$\frac{\text{Jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan}}{\text{Jumlah angkatan kerja perempuan}} \times 100 \%$	$\frac{20.064}{56.960} = 35,22\%$	

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KETETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
18	Sosial	56	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	Menunjukkan jumlah sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo, panti rehabilitasi yang terdapat di suatu daerah	7 buah	
		57	Persentase penyandang cacat baik fisik dan mental, serta lanjut usia yang tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial dalam satu tahun ----- x 100 % Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lansia tidak potensial yang seharusnya menerima jaminan sosial dalam 1 tahun.	<u>68</u> 1.276 = 5,33%	
		58	PMKS yg memperoleh bantuan sosial	Jumlah PMKS yg diberikan bantuan ----- x 100 % Jumlah PMKS yg seharusnya menerima bantuan (36.416)	<u>26.856</u> 36.416 = 73,74%	